

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2015

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, maka berikut ini diinformasikan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2015 ini merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang ruang lingkup pembahasannya mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

A. GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE

Kota Parepare secara geografis terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, maka Kota Parepare ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan. Pemaknaan pusat pelayanan antar wilayah diterjemahkan oleh Pemerintah daerah Kota Parepare dalam visinya sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, religius dan berkomitmen Lingkungan.

Dengan luas 99,33 Km², Kota Parepare berada pada posisi 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur, dengan kondisi topografi secara umum terbagi dalam 2 (dua) morfologi, yakni; dataran dan perbukitan. Secara administratif, Kota Parepare terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan.

Berdasarkan hasil Proyeksi penduduk Kota Parepare, penduduk kota Parepare Tahun 2014 berjumlah 136.903 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan.

Dari 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare, Kecamatan Soreang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 44.769 jiwa. Disusul kemudian oleh Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 41.697 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 33.684 jiwa dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 16.753 jiwa.

Angka kepadatan penduduk Kota Parepare tahun 2014 1.378 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Soreang yaitu 5.374 jiwa/km² dan yang terendah adalah Kecamatan Bacukiki sebesar 251 jiwa/km²

Penduduk Usia Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) yang ada di Kota Parepare berjumlah 97.296 orang yang terdiri dari 58.978 orang Angkatan Kerja dan 38.318 orang Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2014 sebanyak 7,06 persen.

Perekonomian Parepare pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Parepare tahun 2014 mencapai 6,09 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 7,97 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,39 persen. Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2010-2014

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,30	8,58	1,81	11,42	13,39
B	Pertambangan dan Penggalian	5,62	7,72	7,36	5,61	10,37
C	Industri Pengolahan	1,60	6,53	7,40	8,77	5,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,38	10,42	13,71	2,30	10,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,57	10,20	2,57	5,06	0,89
F	Konstruksi	9,58	9,80	7,80	9,44	3,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,38	7,25	9,75	7,53	5,11
H	Transportasi dan Pergudangan	6,39	9,28	8,52	7,55	13,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,35	7,35	13,70	7,94	9,33
J	Informasi dan Komunikasi	20,13	11,88	15,98	9,88	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	22,14	13,22	12,99	6,61	12,59
L	Real Estat	6,58	14,89	13,84	13,96	9,13
M,N	Jasa Perusahaan	4,36	7,29	8,58	8,80	4,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,01	4,31	1,28	2,26	0,78
P	Jasa Pendidikan	4,33	2,67	7,70	6,36	1,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,33	9,14	10,09	8,11	10,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,08	6,57	8,54	5,56	5,86
Total		7,99	8,42	8,80	7,97	6,09

Sumber : PDRB Kota Parepare 2015

PDRB perkapita Kota Parepare setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Parepare mencapai 32,34 juta Rupiah dibanding tahun 2013 yang hanya mencapai 20,50 juta rupiah.

Untuk melihat keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia di suatu Negara atau wilayah, dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah melaksanakan kerjasama pengkajian dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kinerja pembangunan dengan menggunakan Parameter IPM atau HDI, dengan menggunakan 3 (Tiga) indikator yaitu: i) Indeks Kesehatan, dengan pilihan angka harapan hidup, ii) Indeks Pendidikan, dengan pilihan rata-rata Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah, iii) Indeks Paritas Daya Beli. Hasil kajiannya telah dipublikasikan melalui penerbitan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun 2015, dengan hasil-hasil sebagai berikut :

1. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (e_0) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Pada tahun 2014 angka harapan hidup Kota Parepare tercatat sekitar 70,39 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin baik dalam kurun waktu 2014, jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Sulawesi Selatan yang hanya 69,60 tahun. Indeks kesehatan Kota Parepare tahun 2014 yaitu 77,52 persen juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 76,30 persen. Walaupun indeks kesehatan di daerah ini, relative membaik atau sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata Sulawesi Selatan, tetapi perhatian di bidang ini harus terus ditingkatkan.

2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan terdiri dari dua unsur yaitu rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk 7 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 25 tahun keatas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, komponen rata-rata Harapan Lama Sekolah pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan dari 13,65 tahun menjadi 14,04 tahun. Begitu juga, rata-rata lama sekolah pada tahun 2014 meningkat menjadi 9,95 tahun dibandingkan tahun 2013 sebesar 9,89 tahun. Angka ini lebih tinggi daripada angka Sulawesi Selatan yang hanya sekitar 7,49 tahun. Dengan melihat angka tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 2014 penduduk Kota

Parepare rata-rata menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD dan SMP, demikian juga pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota lainnya maka angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Parepare berada di atas rata-rata angka Sulawesi Selatan. Fenomena ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Parepare dibidang pendidikan sudah semakin baik.

3. Indeks Paritas Daya Beli

Komponen PPP (Purchasing Power Parity) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, dalam laporan ini digunakan PDRB riil perkapita. Penggunaan PDRB riil perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi susenas) belum sampai estimasi kabupaten/kota. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kota Parepare dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai indikator standar hidup layak. Daya beli penduduk Kota Parepare pada tahun 2014 sekitar 12.692 ribu rupiah. Sementara itu, rata-rata daya beli penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2014 hanya sekitar 9.723 ribu rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare pada tahun 2014 sekitar 75,66 persen. Posisi IPM Kota Parepare pada tahun 2014 berada pada peringkat ke dua dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 IPM Kota Parepare sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dan masih lebih tinggi dari rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan (68,49 %).

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Kota Parepare adalah “Terwujudnya Masyarakat Maju Yang Religius Dan Berdayatahan Lingkungan”, dimana RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 merupakan tahapan kedua dan ketiga pentahapan pembangunan daerah sebagaimana diatur di dalam RPJPD Kota Parepare. Oleh karena itu Visi Pembangunan Kota Parepare didalam RPJMD Tahun 2013-2018 harus tetap mengacu pada Visi yang ada di dalam RPJPD Kota Parepare tersebut serta arahan-arahan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah (Hasil Pemilihan Kepala Daerah), dimana didalam Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih harus menggambarkan arah

pembangunan daerah atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Oleh karena itu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye maka ditetapkan Visi Pembangunan Kota Parepare untuk Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat”

Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 di atas, memiliki makna :

- a. ***Maju***, mengandung arti: mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.
- b. ***Peduli***, mengandung arti: mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan.
- c. ***Mandiri***, mengandung arti: mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- d. ***Bermartabat***, mengandung arti: harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.
- b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- c. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.
- d. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.

- e. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.

Tujuan dan Sasaran

Untuk melaksanakan kelima misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.

Tujuan :

1. Pemerataan layanan pendidikan menuju masyarakat yang cerdas.

Sasaran :

- Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.

2. Pemerataan layanan kesehatan menuju masyarakat yang sehat.

Sasaran :

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi Kedua : Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan :

1. Akselerasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkesinambungan.

Sasaran :

- Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat..

Sasaran :

- Meningkatnya ketersediaan pangan utama dengan harga terjangkau.

Misi Ketiga : Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.

Tujuan :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup.

Sasaran :

- Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- Meningkatnya ketersediaan air bersih.
- Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.

Misi Keempat : Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat.

Tujuan:

1. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat

Sasaran :

- Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sasaran :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah

3. Mewujudkan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran:

- Meningkatnya kesetaraan gender.
- Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Misi Kelima : Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.

Tujuan :

Mewujudkan masyarakat Parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya

Sasaran :

- Terjaganya kerukunan antar umat beragama
- Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. Strategi

Misi ke-1

1. Penghapusan biaya-biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa/orang tua siswa (Usia Dini s/d SMA).

2. Pemberian motivasi kepada anak untuk terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

3. Pengembangan saran pendidikan dan informatika.

1. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat Parepare.
2. Pengembangan sarana penunjang kesehatan masyarakat.

Misi ke-2

1. Peningkatan nilai tambah hasil kegiatan perekonomian daerah.
2. Intensifikasi dan diversifikasi bahan pangan utama.

Misi ke-3

1. Pengembangan infrastruktur kawasan budidaya kota.
2. Peningkatan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam dan Mineral.
3. Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau.

Misi ke-4

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah).
2. Peningkatan keahlian dan profesionalisme aparatur.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat penyusunan proses pembangunan.
4. Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan anak serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Misi ke-5

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
2. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal masyarakat.

C. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan pencapaian realisasi pendapatan asli daerah dalam tahun anggaran 2015 :

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Bagian Pendapatan Asli Daerah	122,188,461,211.00	115,375,900,433.35	94.42%
2	Bagian Dana Perimbangan	593,764,770,000.00	588,312,792,984.00	99.08%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	124,405,993,460.98	132,885,751,564.19	106.82%
	JUMLAH	840,359,224,671.98	836,574,444,981.54	99.55%

Pencapaian atau realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2015 tidak mencapai target yaitu terjadi selisih kurang sebesar Rp.3.784.779.690,44 atau tingkat pencapaian sebesar 99,55 persen dari target yang telah ditetapkan.

2. Target dan Realisasi Belanja

Mencermati Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 total anggaran belanja daerah Kota Parepare menjadi sebesar Rp.987.033.211.482,- dan sampai dengan akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.784.187.029.833,99 atau dengan persentase realisasi sebesar 79,45 persen.

a) Belanja Tidak Langsung

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	PERSENTASE %
1	Belanja Pegawai	376,863,903,000.00	345,661,955,901.00	91.72
2	Belanja Bunga	4,500,000,000.00	3,120,199,371.39	69.34
3	Belanja Hibah	5,000,000,000.00	3,241,000,000.00	64.82
4	Belanja Bantuan Sosial	9,121,600,000.00	6,515,698,549.00	71.43
5	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kab/Kota	805,904,060.00	805,904,056.00	100.00
6	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	183,400,000.00	6.11
	TOTAL	399,291,407,060.00	359,528,157,877.39	90.04

Jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD TA 2015 khusus Belanja Tidak Langsung atau belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, sebesar Rp.399.291.407.060, dengan realisasi belanja tidak langsung hanya sebesar Rp.359.528.157.877,39 atau sebesar 90,04 persen.

b) Belanja Langsung

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	18,248,863,000.00	15,055,285,270.00	82.50
2	Belanja Barang & Jasa	244,807,225,792.00	207,125,189,945.60	84.61
3	Belanja Modal	324,685,715,630.00	202,478,369,741.00	62.36
	JUMLAH	587,741,804,422.00	424,658,844,956.60	72.25

Jumlah anggaran Belanja Langsung atau belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang direncanakan yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal adalah sebesar Rp.587.741.804.422,- dengan tingkat realisasi keuangan sebesar Rp.424.658.844.956,60,- atau sebesar 72,25%.

c) Pembiayaan Daerah

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	114,576,425,185.02	114,649,634,271.02	100.06
2	Pengeluaran Pembiayaan	5,475,075,000.00	4,759,112,785.38	86.92
	TOTAL	120,051,500,185.02	119,408,747,056.40	99.46

Adapun penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.114.576.425.185,02 dan terealisasi sebesar Rp.114.649.634.271,02 terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp.114.399.634.271,02, penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp.250.000.000,-, dan penerimaan pinjaman daerah Rp.250.000.000, Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.5.475.075.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.759.112.785,38, terdiri dari pembayaran pokok utang sebesar Rp.3.009.112.785,38, dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.250.000.000,-

D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DESENTRALISASI)

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Parepare tahun 2015, berikut uraian capaian pelaksanaan program-program pembangunan menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018.

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan.

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan ini sebesar Rp. 265.181.350.925,00,- dengan realisasi Rp.238.870.247.579,- atau 90,08 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, antara lain :

- a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya pemberian beasiswa berprestasi kepada 34 siswa SD dan 34 siswa SMP dan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu kepada 313 siswa SD dan 255 siswa SMP.
- b) Program Pendidikan Menengah yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya penyelenggaraan program pendidikan gratis dengan sasaran 3.750 siswa SMA, 3.955 siswa SMK dan 836 siswa MA.

2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD A. MAKKASAU dengan alokasi anggaran sebesar Rp.227.993.362.209,- dengan realisasi Rp.199.807.515.928,- atau 87,64 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya pelayanan *Call Center* 112 yang bersifat *emergency* dan pelayanan *ambulance* untuk kegiatan "Jumat Peduli" tiap hari jumat.
- b) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan diantaranya pembangunan RS. Type B Plus.
- c) Program pengadaan peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit dengan capaian tersedianya alat-alat rumah sakit berupa Flow Meter, Pulse Oxymeter, Cpap, Syringe Pump, T.Piece Resusitator, Patient Monitor, Incubator Transport, Infusion Pump, Blood Warmer dan Matras Decubitus.

3. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggara urusan ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.991.589.500,- dengan realisasi Rp.19.045.635.367,- atau 95,27 persen, yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program peningkatan pengendalian polusi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengujian tingkat pencemaran lingkungan pada sungai Karajae, sumber mata air (Belakang SDN 71 Parepare, Sumur Jodoh Soreang dan sumber mata air Geddongnge), pengujian kualitas udara (terminal Lumpue, depot Pertamina, lapangan A.Makkasau, dan perumnas Wekke'e), dengan hasil pengujian 168 titik sampel dibawah ambang batas normal.
- b) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan berupa Mobil Pick Up sebanyak 3 unit, Mobil Dump Truck sebanyak 2 unit, Kontainer 13 buah, dan pengadaan tong sampah sebanyak 295 unit.

4. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang serta Pengawasan Bangunan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.132.854.834.335,- dengan realisasi anggaran Rp.73.870.460.534,- atau 55,60 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan tingkat capaian kinerja yaitu :
 - 1) Pembangunan Jalan dengan capaian bertambahnya panjang jalan sebanyak 2.030 meter;
 - 2) Pembangunan jalan beton kompleks kawasan Industry Parepare dengan capaian pembangunan jalan beton 200 meter;
- b) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong. Adapun capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :

- 1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan capaian 3.945,65 meter;
- 2) Rehabilitasi saluran/drainase dengan capaian 1.522,57 meter;
- c) Program pemeliharaan jalan umum yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya pengadaan pemasangan tiang lampu jalan dan lampu hias yang berlokasi di Jl. Mattirotasi dengan jumlah 71 tiang lampu, 142 lampu LED 80 watt dan lampu hias 66 tiang..

5) Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.14.323.289.950,- dengan realisasi anggaran Rp.13.181.092.393,- atau 92,03 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program peningkatan kawasan perkotaan dengan kegiatan peningkatan kawasan permukiman, yaitu pekerjaan jalan setapak/jalan lingkungan, saluran dan talud yang tersebar di 15 kelurahan serta pengadaan lampu penerangan lorong dengan jumlah 1.539 titik lampu di 301 lorong tersebar di 22 Kelurahan.
- b) Program perencanaan tata ruang, dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan evaluasi Perda ruang terbuka hijau.

6) Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.7.103.652.165,- dengan realisasi anggaran Rp.6.206.132.191,- atau 87,37 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan, antara lain :

- a) Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD secara berjenjang pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrembang Kota serta koordinasi perencanaan pembangunan ke Propinsi dan Musrenbangnas.

- b) Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan diantaranya Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster.
- c) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan kegiatan diantaranya Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya Jompie Parepare (Hutan Jompie).

7) Penyelenggaraan Urusan Perumahan.

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.307.975.200,- dengan realisasi anggaran Rp.257.634.300,- atau 83,65 persen yang dilaksanakan dalam program dengan masing-masing kegiatannya, antara lain :

- a) Program pengembangan perumahan dengan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Lapadde sebanyak 14 unit.
- b) Program Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan melalui kegiatan perbaikan jalan dengan paving blok dan plat penutup saluran di Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Bukit Indah.

8) Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.3.606.180.200,- dengan realisasi anggaran Rp.3.243.428.410,- atau 89,94 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan Pembangunan patung pramuka dan pendataan dan pemutakhiran lembaga–lembaga kepemudaan.
- b) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga dengan melaksanakan kompetisi olahraga antar pelajar.

9) Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.514.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp.454.530.700,- atau 88,34 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan klaster bisnis UKM berdasarkan jenis produk yaitu klaster meubel, klaster panggaraman ikan, klaster kuliner kue tradisional dan klaster batubata.
- b) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dilaksanakan dalam kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi dengan capaian penerbitan sertifikat penilaian kesehatan koperasi terhadap kondisi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

10) Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.4.010.717.850,- dengan realisasi anggaran Rp.2.841.867.085,- atau 70,85 persen yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan diantaranya pelayanan terpadu penertiban Akta Kelahiran dengan capaian terlaksananya kegiatan pembuatan akta kelahiran sebanyak 4.876 akta.

11) Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.5.193.421.950,- dengan realisasi anggaran Rp.4.998.641.614,- atau 96,24 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pelatihan pembuatan Souvenir dari kerang-kerangan dan aneka kuliner dari hasil laut sebanyak 25 orang di CempaE Kel. Wattang Soreang dan Pelatihan pembuatan souvenir dari perca kain sebanyak 50 orang di LumpuE Kel. LumpeE.

- b) Program peningkatan kesempatan kerja yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dengan capaian tersedianya informasi lowongan pekerjaan bagi pencari kerja di 150 perusahaan. Jumlah pencari kerja sebanyak 815 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 651 orang.

12) Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan

Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.4.021.636.000,- dengan realisasi anggaran Rp.3.770.277.080,- atau 93,74 persen yang dilaksanakan dalam bentuk program peningkatan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya Penyusunan analisis ketersediaan pangan dan neraca bahan makanan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan untuk tahun 2015 berada pada angka rata-rata 30.679 ton pertahun atau 221.55 kg/kap/hari.

13) Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 8.707.562.350,- dengan realisasi anggaran Rp. 8.264.522.367,- atau 94,91 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan diantaranya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan capaian terlaksananya pelatihan bagi Para Legal dasar dan Para Legal Lanjutan.
- b) Program keluarga berencana dengan kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin sebanyak 330 bagi masyarakat kurang mampu.

14) Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.7.360.433.900,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.047.050.995,- atau 95,74 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan Pembangunan 1 Unit Halte bus dan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1500 unit.
- b) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan kegiatan Pengadaan zona selamat sekolah sebanyak 1 Unit di SMP Negeri 2 dan rehab/pemeliharaan marka jalan sepanjang 2.200 meter.

15) Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.5.765.535.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.378.510.554,60,- atau 58,59 persen yang dilaksanakan dalam program kerjasama Informasi dan media massa dengan kegiatan fasilitasi layanan informasi bagi masyarakat dengan capaian tersusunnya naskah akademik Ranperda LPPL TV Peduli.

16) Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp.8.840.005.170,- dengan realisasi anggaran Rp.7.912.118.521,- atau 89,50 persen yang dilaksanakan dalam program dengan kegiatan antara lain :

- a) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan penegakan peraturan daerah
- b) Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan diantaranya sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diikuti 50 orang peserta terdiri dari unsur Ormas, LSM dan Pemerintah Daerah.

17) Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh sebelas SKPD, diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, 4 (Empat) Kecamatan, Kantor Pelayanan Perizinan, Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretariat Korpri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.932.639.793,- dan realisasi sebesar Rp.150.475.715.608,- atau 90,14% dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan diantaranya Pelaksanaan pengadaan tanah dengan capaian pelaksanaan kegiatan tersedianya satu bidang tanah untuk pembangunan Baruga Peduli di Kecamatan Bacukiki dan 109 bidang tanah untuk pelebaran jalan Jenderal Sudirman dengan perincian :
1. Kelurahan Sumpang Minangaesebanyak 8 bidang Tanah
 2. Kelurahan Cappa Galung sebanyak 9 bidang Tanah
 3. Kelurahan Tiro Sompe sebanyak 4 bidang Tanah
 4. Kelurahan Kampung Baru sebanyak 9 bidang Tanah
 5. Kelurahan Lapadde sebanyak 25 bidang Tanah
 6. Kelurahan Bumi Harapan sebanyak 54 bidang Tanah
- b) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan/Penyelesaian Rekomendasi, dengan capaian penyelesaian rekomendasi/Izin Prinsip, sebanyak 21 izin prinsip. Penyelesaian rekomendasi dilaksanakan untuk memberikan kemudahan kepada setiap orang/badan usaha yang akan melakukan investasi atau kegiatan ekonomi dan sosial lainnya di Kota Parepare.
- c) Program kerjasama informasi dengan media massa dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan termuatnya berita-berita kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Parepare di berbagai media.
- d) Program Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan diantaranya pemberian insentif bagi pengelola/pengurus masjid dan panti asuhan serta guru mengaji dan sekolah minggu sebanyak 2.396 orang.
- e) Program peningkatan dan pengembangan produksi daerah dengan kegiatan Penyaluran beras untuk keluarga miskin (RASKIN) sebanyak 4.965 rumah tangga miskin (RTS) selama 12 bulan dan ditambah raskin bulan 13 dan bulan 14.
- f) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan diantaranya Bimbingan teknis Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, yang diikuti sebanyak 72 orang.

- g) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Lakip, dan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pemerintah Kota Parepare yang dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditentukan, keseluruhan unit pelayanan masuk dalam kategori “BAIK” atau 67.8 persen masyarakat yang menyatakan cukup puas dengan kinerja Pemerintah Kota Parepare.
- h) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan diantaranya Pemagaran pemagaran Aset pada Pasar Lakessi, Pasar Kuliner dan Eks Kantor Pramuka Cadika.
- i) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan kegiatan diantaranya Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian pelaksanaan kegiatan ditetapkannya 12 perda, masing-masing 5 perda inisiatif DPRD dan 7 perda usulan dari eksekutif.
- j) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan diantaranya pendampingan rewiuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan BPKP, pendampingan evaluasi LAKIP dengan Inspektorat Provinsi dan pendampingan Probitiy Audit Pengadaan Barang dan Jasa dengan BPKP.
- k) Program pembinaan dan pengembangan aparatur yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan diantaranya Penetapan NIP CPNSD sebanyak 52 orang CPNS formasi Umum.
- l) Program mengintensifkan penanganan pengaduan dengan kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat, pembinaan lmtag dan organisasi kemasyarakatan, peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RT/RW, Imam mesjid dan Kelurahan, Intensifikasi penagihan PBB dan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan.
- m) Program peningkatan pelayanan perizinan satu atap dengan kegiatan Penyediaan jasa pelayanan pada bidang perizinan dan Non perizinan.
- n) Program fasilitas pindah/purna tugas PNS yang dilaksanakan dalam kegiatan prosesi pemakaman jenazah anggota KORPRI sebanyak 25 kali.

- 18) Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
Urusan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.028.498.250,- dan realisasi sebesar Rp.3.909.234.726 atau 97,04 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :
- a) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan diantaranya perbaikan rumah layak huni masing-masing di Kecamatan Bacukiki sebanyak 16 unit, Kecamatan Bacukiki barat sebanyak 16 unit, kecamatan Soreang sebanyak 16 unit dan kecamatan Ujung sebanyak 16 unit.
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan manajemen pemerintah bagi aparat kelurahan yang diikuti sebanyak 44 orang.
- 19) Penyelenggaraan Urusan Sosial**
Urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.508.473.400,- dan realisasi sebesar Rp.4.824.902.576,- atau 87,59 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan kegiatan diantaranya pemberian bantuan berupa alat perbengkelan, alat pertukangan, makanan siap saji, laundry dan service sebanyak 842 orang.
- 20) Penyelenggaraan Urusan Statistik**
Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 94.996.000,- atau 100 persen dengan pelaksanaan program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data pokok daerah dan penyusunan dokumen Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare.
- 21) Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan**
Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.973.956.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.827.227.407,- atau 92,56 persen dengan pelaksanaan program antara lain :

- a) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan 340 kelas arsip sesuai sistem katalog data
- b) Program peningkatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan kegiatan Pengadaan buku perpustakaan sebanyak 285 judul buku dan 1.075 eksampler buku

22) Penyelenggaraan Urusan Pertanian dan Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.118.824.210,- dan realisasi sebesar Rp. 15.828.496.083,- atau 87,35 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Penyediaan bibit tanaman berupa, bibit padi 1.875kg, jagung 800kg, kacang panjang 25 kg, kangkung 24 kg, sawi 10 kg, bayam 25 kg dan jeruk 100 pohon dan Pengadaan alat-alat pertanian berupa Alat pemipil jagung 1 unit, Hand traktor 4 unit, Pompa air 3 unit, Pengadaan peralatan bengkel alsintan.
- b) Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyusunan DED Revitalisasi Kebun Raya Jompie serta review master plan KR Jompie.
- c) Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pembangunan kios/pertokoan di PPI sebanyak 5 unit, rehabilitasi ruang pertemuan nelayan sebanyak 1 unit dan pembangunan jalan produksi perikanan sepanjang 3mx 60m dan jembatan 9m x 7m sebanyak 9 buah.

23) Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.112.751.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.081.843.800,- atau 97,22 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program pengembangan pemasaran pariwisata, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Festival Salo Karajae yang melibatkan daerah-daerah di Sulawesi Selatan.
- b) Program pengembangan destinasi pariwisata, dengan kegiatan penyelenggaraan festival Mallipa di Wattang Bacukiki.

24) Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.484.385.500,- dan realisasi sebesar Rp.13.158.228.681,- atau 85,86 persen dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dengan kegiatan pemberian kemudahan perizinan usaha dengan capaian perizinan SITU dan TDI yang terbit sebanyak 787 izin.
- b) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dilaksanakan dalam kegiatan diantaranya pembangunan pasar senggol.

E. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Selain menyelenggarakan urusan desentralisasi, Pemerintah Kota Parepare juga menyelenggarakan tugas pembantuan yang berasal dari dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Parepare mendapatkan bantuan pendanaan melalui 6 (enam) SKPD untuk menjalankan tugas pembantuan tersebut, yaitu :

a. Dinas Tenaga Kerja

Padat Karya Infrastruktur

1. Padat Karya Infrastruktur satu yaitu pembuatan Jalan Desa/JalanTanah sepanjang 1000 meter, jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang dengan lokasi Kelurahan LemoE Kecamatan Bacukiki.
2. Padat Karya Infrastruktur dua yaitu pembuatan Jalan Desa/Jalan Tanah sepanjang 700 meter, jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang dengan lokasi Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki.
3. Padat Karya Infrastruktur tiga yaitu pembuatan Jalan Desa/Jalan Tanah sepanjang 700 meter, jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang dengan lokasi Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki.

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kerja Mandiri

1. Paket 1 Kelurahan Sumpang Minangae dengan jenis usaha penangkapan ikan laut dengan serapan tenaga kerja 20 orang.
2. Paket 2 Kelurahan Labukkang dengan jenis usaha pembuatan kue dan warung dengan serapan tenaga kerja 20 orang

3. Paket 3 Kelurahan Cappa Galung dengan jenis usaha tata rias dengan serapan tenaga kerja 20 orang
4. Paket 4 Kelurahan Ujung Bulu dengan jenis usaha konveksi dengan serapan tenaga kerja 20 orang

b. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan 84 kelompok perikanan yang bergerak dalam usaha perikanan tangkap, budidaya ikan, pemasaran ikan, pengolahan hasil perikanan (abon dan naget), pengelolaan kawasan pesisir pantai dan kelompok tabungan perikanan.

c. Dinas kesehatan

1. Cakupan Persalinan di fasilitas kesehatan dengan capaian terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi KIA/KB dengan cakupan persalinan difasilitas kesehatan sebanyak 2.608 dari 2.610 persalinan oleh nakes.
2. Jumlah gizi kurang yang ditangani dengan capaian terpantaunya gizi kurang di Parepare sebanyak 87 orang.
3. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) berkualitas dengan capaian terpantaunya kunjungan neo natal dengan cakupan KN 12.609 kunjungan neo natal.

d. RSUD A. MAKKASAU

Pengadaan alat-alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan di RSUD A. Makkasau.

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu.

f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Pembangunan sarana distribusi perdagangan yaitu pembangunan pasar senggol yang terletak di Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung dengan luas bangunan Segmen A seluas 760 m² dan segmen B seluas 1.921,5 m².

F. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diantaranya meliputi kerjasama daerah dengan instansi vertikal di daerah, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

a) Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

- 1) Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Parepare.
- 2) Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan DPD KNPI Kota Parepare.
- 3) Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan Pramuka Kwarcab Parepare.

b) Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Berkaitan dengan koordinasi dengan instansi vertikal yang terdiri dari Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) dengan tujuan utama pembentukan forum tersebut adalah terpeliharanya kerukunan dan toleransi antar umat beragama dan terciptanya suasana aman dan kondusif di lingkungan Masyarakat Kota Parepare.

c) Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan yang ditempuh untuk percepatan proses penyelesaian masalah batas wilayah antara Kota Parepare dengan kabupaten Sidrap dan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang adalah meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah penegasan batas daerah tersebut.

d) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2015 telah terjadi bencana angin kencang yang mengakibatkan kerusakan baik rusak berat maupun ringan. Untuk penanggulangan dampak bencana telah diberikan bantuan sebesar Rp. 183.400.000,- sebagai bantuan untuk perbaikan rumah dan lain-lain peruntukannya.

5) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kota Parepare sebagai kota yang basis masyarakatnya heterogen mampu menjaga ketentraman dan ketertiban umum dari segala konflik yang berpotensi terjadi. Penguatan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, antar pemuka agama, serta peran aktif masyarakat akan terus dikedepankan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dan pelibatan aparat keamanan dalam hal ini pihak TNI dan Kepolisian melalui Babinsa dan Babinmas.

G. PENUTUP

Pencanangan tahun 2015 sebagai tahun kinerja telah menunjukkan berbagai keberhasilan diberbagai bidang. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Parepare dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Diantara penghargaan yang diterima adalah penghargaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Kategori Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Program BPJS kesehatan, Inovasi Pelayanan Kesehatan terbaik se Sulawesi Selatan tahun 2015 yang diraih program Call Center 112 oleh The Fajar Institut Pro Otonomi (FIPO), Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup, Penghargaan Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan dan Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan dan terakhir penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan nilai sangat tinggi yang meliputi semua indikator dari pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berbagai capaian yang diperoleh menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015 yang sesungguhnya merupakan capaian dari pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang merupakan implementasi tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Capaian tersebut dapat diukur dari penilaian berbagai indikator kinerja pemerintah daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang direfleksikan kedalam target-target RKPD tiap tahunnya yang dalam periode tahun kedua RPJMD ini terdapat beberapa indikator yang sudah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan selama tahun 2015 perlu diapresiasi.

Selama pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2015 tentunya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dan belum memuaskan semua pihak, namun apa yang telah dicapai merupakan

modal dasar bagi upaya perbaikan peningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada seluruh aparatur pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 ini kami publikasikan untuk diketahui oleh masyarakat Kota Parepare pada khususnya dan oleh seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran pendapat ataupun tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat menyampaikan melalui SMS CENTRE Pengaduan Masyarakat 08521111353 atau berkunjung langsung pada kantor kami melalui Bagian Hubungan Masyarakat dan atau pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Parepare Jl. Jenderal Sudirman Nomor 78, Telepon 0421-21157 psw. 230, 231, 207,214 Fax 0421-21090. Untuk mendapatkan informasi secara mendetail dan selengkapnya mengenai Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2015 dapat dibuka melalui website Pemda Kota Parepare (www.pareparekota.go.id).

Sekian dan Terima Kasih!

WALIKOTA PAREPARE,

DR. H. TAUFAN PAWE, SH, MH